

**STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM
PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
SOFIY HASBIYYAH
NIM. 1423203168

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

**STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM
PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN BANYUMAS**

**Sofiy Hasbiyyah
NIM. 1423203168**

E-mail: Sofiyhasbiyyah25@gmail.com
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pengembangan Usah Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu program pembangunan bidang ekonomi yang bertujuan untuk menyelenggarakan UMKM secara menyeluruh dan optimal sehingga diharapkan mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Akan tetapi UMKM di Kabupaten Banyumas tidak sepenuhnya menyerap pengangguran dan pelaku UMKM relatif sedikit dibandingkan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas. Jika UMKM tersebut dikelola dengan baik maka dapat bersaing dan menjadi penopang utama perekonomian daerah. Perkembangan UMKM ini tidak terlepas dari peran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas selaku pemerintah dalam pengembangan UMKM.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif model interaktif yang dilakukan selama dan setelah kegiatan pengumpulan data dilakukan. Kegiatan ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dianalisis menggunakan matriks analisis SWOT.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka alternatif strategi yang dapat dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas dalam mengembangkan UMKM adalah mengembangkan produk UMKM, mengembangkan masyarakat banyumas sebagai pasar potensial, mengembangkan pusat-pusat pelayanan perekonomian regional, mengembangkan iklim yang kondusif, mengembangkan masyarakat banyumas sebagai pasar potensial, mengembangkan lapangan pekerjaan, mengembangkan produk-produk yang berkualitas, mengembangkan produk yang beredar dengan ketentuan memenuhi undang-undang dan mengembangkan kecenderungan masyarakat menengah ke atas yang cinta terhadap produk dalam negeri

Kata Kunci: Strategi Pengembangan dan UMKM,

**SMEs DEVELOPMENT STRATEGIES
AT THE DIVISION OF WORKER, COOPERATION AND SME
BANYUMAS REGENCY**

**Sofiy Hasbiyyah
NIM. 1423203168**

E-mail: Sofiyhasbiyyah25@gmail.com

Department of Islamic Economics Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

SMEs development is one of economic development program purposed to implementating SMEs comprehensively and optimally so it can to improve the position, role and potency of SMEs to realizegood economic development, distribution, and improving the welfare for community. But, SMEs Banyumas Regency not really can absorb jobless people and business in SMEs sector because the number of establishment unit area smaller than number of people in Banyumas Regency. If SMEs has good management so they can compete and going to be the main economic structure of the region. SMEs development are influenced by Division of Worker, Cooperation and SME of Banyumas Regency.

This research is a type of field research which is using descriptive-quantitative method. Writer has collected the data through observation, interview, and documentation. Technique to analizing the data are using analitative model on qualitative method from pre-research and after the research has done. This research include data reduction, data serving and conclusion. At the end, the result analyzed by SWOT model.

Based on the research of the SWOT analysis, alternative strategy that can to applicate in Division of Worker, Cooperation and SME of Banyumas Regency to developing SMEs such as developing the community to be potential market, developing the centre of economic service in the region, potential job place, build the condusive environment for business, qualifield the product, standarized the product to law allowed, actualizing the middle class of community to wear the domestic SMEs product.

Keywords: Strategy Development and SMEs,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Strategi	18
1. Konsep Strategi	18
2. Tipe-Tipe Strategi	23
B. Pengembangan	25
1. Konsep Pengembangan	25
2. Ciri-Ciri Pengembangan.....	29
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	30

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	30
2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	32
3. Asas-Asas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	36
D. Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)....	38
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	38
2. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan	38
3. Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran	40
4. Penguatan Kelembagaan Usaha.....	41
5. Kemudahan, Kepastian dan Perlindungan Usaha	42
E. Landasan Teologis	
1. Pengembangan Bisnis dalam Islam.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Fokus Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	57
1. Kondisi Geografi Wilayah Kabupaten Banyumas	57
2. Sejarah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas.....	58
3. Dasar Hukum dan Visi Misi.....	58
B. Strategi Pengembangan UMKM pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.....	59
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	60

2. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Perluasan Skema Pembiayaan	65
3. Peningkatan Nilai Tambah Produk dan Jangkauan Pemasaran	68
4. Penguatan Kelembagaan Usaha	69
5. Kemudahan, Kepastian dan Perlindungan Usaha	71
C. Analisis SWOT Strategi Pengembangan UMKM pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	73
D. Matriks SWOT Strategi Pengembangan UMKM pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi yang dalam realisasinya diwujudkan ke dalam bentuk otonomi daerah sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan prinsip yang esensial dalam memahami otonomi daerah.¹ Tujuan utama otonomi daerah diarahkan untuk mepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah juga dimaksudkan untuk mempermudah artikulasi dan implementasi kebijakan pembangunan, mengurangi dan menyederhanakan prosedur birokrasi yang rumit, efektivitas pelaksanaan koordinasi berbagai kegiatan, meningkatkan efisiensi tugas-tugas rutin pemerintah, serta meningkatkan efisiensi pemberian pelayanan kepada masyarakat menyangkut kebutuhan dasarnya.²

Salah satu upaya untuk mewujudkan keberhasilan otonomi daerah adalah melalui pengembangan ekonomi daerah. Pengembangan ekonomi daerah didasarkan atas kondisi riil daerah dan masyarakat dengan melihat setiap potensi yang ada. Secara praktis, upaya ini dilakukan dengan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, yaitu dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada, sehingga masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh nilai pokok, yaitu: (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

¹ Agus, Dwiyanto, dkk, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2003), hlm. 18

² HAW, Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 131.

pokoknya (*basic need*); (2) meningkatkan rasa harga diri (*self esteem*); dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).³

Salah satu bentuk pengembangan ekonomi daerah adalah pengembangan sektor riil atau sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan undang-undang, UMKM diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan ekonomi daerah, gerak sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UMKM sangat terbuka kepada siapa saja, jumlah relatif banyak dan bervariasi, sehingga UMKM dapat dikatakan merupakan basis ekonomi masyarakat luas. UMKM sangat dinamis dalam meningkatkan persaingan, menyesuaikan diri dengan gejolak ekonomi dan pengembangan teknologi, menciptakan raga pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan produksi. Dari total jumlah unit usaha yang ada, lebih dari separuhnya berupa usaha kecil dan diperkirakan menyediakan 80 persen kesempatan kerja.⁴

Bahwasannya ada dua alasan mengapa UMKM sangat diperlukan, terutama oleh negara-negara miskin yang sedang berkembang seperti Indonesia. *Pertama*, UMKM terbukti menjadi penyerap tenaga kerja yang sangat besar. *Kedua*, penguatan UMKM akan mempercepat proses distribusi pendapatan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak berupaya mendorong dan memberikan perhatian serius terhadap perkembangan UMKM karena kedudukannya yang sangat potensial dalam pengembangan ekonomi daerah.⁵

Secara umum, UMKM masih mengalami banyak hambatan dalam pengembangannya, diantaranya yaitu: (1) kelemahan akses dan perluasan pangsa pasar, (2) kelemahan akses dalam pemupukan modal, (3) kelemahan akses pada informasi dan teknologi, (4) kelemahan dalam organisasi dan manajemen, serta

³ Lincolin, Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi kedua (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2005), hlm. 5-6.

⁴ Bobo J, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Cidesindo, 2003), hlm. 12.

⁵ Djoko, Sudantoko, *Dinamika Otonomi Daerah*, (Semarang: Adi Kencana, 2005), hlm. 26-27.

(5) kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan. Kesemuannya ini bersumber dari kelemahan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada rendahnya kualitas produk dan jasa sehingga kurang memiliki daya saing, baik dalam pasar lokal maupun nasional dan internasional.⁶

Hal serupa terjadi di Kabupaten Banyumas, dimana UMKM di Kabupaten Banyumas masih mengalami beberapa kendala atau persoalan, diantaranya yaitu rendahnya kualitas lembaga dan usaha, struktur permodalan, daya inovasi, etos kerja, akses teknologi informasi, peluang pasar, lemahnya jaringan usaha yang pada akhirnya mengurangi daya saing baik dipasar lokal maupun global (Dinnakerkop UKM Kab. Banyumas). Oleh sebab itu, UMKM di Kabupaten Banyumas membutuhkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah (setempat) dalam mengembangkan usahanya. Sehingga mutlak sebuah strategi dari pemerintah (Dinnakerkop UKM) diharapkan mampu menjadikan UMKM sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Banyumas.⁷

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki jumlah UMKM relatif banyak dengan jenis komoditas yang bervariasi. Salah satu ketentuannya yang mendasari UMKM di Kabupaten Banyumas adalah Perbup No 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Pinjaman Dana Kredit Bergulir Perkuatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas menyusun beberapa program sebagai usaha untuk mencapai misi. Program- program kerja yang terkait dengan pengembangan UMKM antara lain:

1. Pelatihan manajemen usaha kecil
2. Penyaluran pinjaman dana bergulir
3. Monitoring dan evaluasi UMKM penerima dana bergulir
4. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
5. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

⁶ Prawirokusumo, S, *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan dan Strategi*, (Yogyakarta: BPF, 1999), hlm. 64.

⁷ Wawancara dengan Ani (Kepala Bidang UKM) pada 12 November 2017 Pukul 09.00 WIB.

6. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

Program-program pengembangan tersebut selama ini sedikit banyak sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Tentu saja pengimplementasian program tersebut bertujuan untuk mengembangkan sektor UMKM, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sebab, sektor UMKM ini dapat membantu untuk memajukan perekonomian daerah. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas tentang perkembangan jumlah UMKM yang di bina oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dari tahun 2014 sampai dengan 2016 diperoleh data dari table sebagai berikut:

(Tabel 1.1) Data Jumlah UMKM Binaan
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas

No	Unit Usaha	2014 (unit)	2015 (unit)	2016 (unit)
1	Usaha Mikro	64.957	65.741	65.741
2	Usaha Kecil	1.551	2.602	2.602
3	Usaha Menengah	25	28	28
Jumlah		66.533	68.371	68.371

Sumber: Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas (2017)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah UMKM Kabupaten Banyumas yang dibina oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM sempat mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2015. Walaupun secara kuantitatif meningkat, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan program utama Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Sebab, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM lebih mengedepankan aspek kualitas sehingga dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di Kabupaten Banyumas. Kontribusi sektor UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Banyumas telah cukup berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan sedikit modal mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. UMKM yang bergerak di sektor industri kecil mempunyai peran yang besar dalam pendapatan daerah melalui ekspor, dan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(Tabel 1. 2) Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di sektor UMKM Kabupaten Banyumas

No	Unit Usaha	2014 (jiwa)	2015 (jiwa)	2016 (jiwa)
1	Usaha Mikro	93.121	97.541	97.541
2	Usaha Kecil	7.101	10.040	10.040
3	Usaha Menengah	503	781	781
Jumlah		100.725	108.362	108.362

Sumber: Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas (2017)

Penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM dapat dikatakan cukup banyak. Banyaknya jumlah penduduk yang menggeluti sektor UMKM ini disebabkan karena latar belakang pendidikan yang bermacam-macam. Kebanyakan dari mereka yang membuka lapangan usaha UMKM mempunyai tingkat pendidikan rendah sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan tenaga dengan latar belakang pendidikan tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, maka pengembangan sektor UMKM di Kabupaten Banyumas harus selalu diupayakan. Sebab, melalui sektor UMKM ini sebagian besar angkatan kerja yang belum memperoleh kesempatan kerja akan dapat diberdayakan.

Tugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dalam pengembangan sektor UMKM ini tidak hanya difokuskan pada kuantitasnya saja, akan tetapi pada segi kualitasnya juga. Dibalik banyaknya sektor UMKM yang berkembang di Kabupaten Banyumas ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha UMKM tersebut. Permasalahan-permasalahannya antara lain rendahnya kualitas lembaga dan usaha, struktur permodalan, daya inovasi, etos kerja, akses teknologi informasi, peluang pasar, lemahnya jaringan usaha yang pada akhirnya mengurangi daya saing baik dipasar lokal maupun global (Dinnakerkop UKM Kab. Banyumas).

Hambatan- hambatan tersebut lah yang menjadi titik fokus Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dalam mengembangkan sektor UMKM di Kabupaten Banyumas. Sebab hal-hal tersebut dapat menyebabkan jalannya usaha UMKM sulit untuk berkembang secara optimal. Upaya-upaya peningkatan akses terhadap pasar, modal, manajemen, teknologi, serta penguatan dan penataan kelembagaan UMKM perlu dilakukan untuk memperkuat posisi transaksi dalam persaingan

pasar dan kemitraan antara ketiga pelaku ekonomi, yaitu BUMN, Swasta, serta KUMKM. Pengembangan sektor UMKM di Kabupaten Banyumas dirasa sangat penting untuk dilakukan. Sebab, dilihat dari kondisi yang ada saat ini, sektor UMKM mampu memberikan lahan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum tertampung dalam dunia kerja. Selain itu, sektor UMKM juga mampu memberikan kontribusi bagi pemasukan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BANYUMAS”**

B. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Strategi Pengembangan UMKM pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, untuk mempermudah pengertian dan maksud judul tersebut, terlebih dahulu disini peneliti jelaskan arti kata atau istilah dari kata- kata penting yang terdapat dalam judul , diantaranya yaitu:

1. Strategi Pengembangan

Strategi berasal dari bahasa Yunani, *stratos* yang artinya tentara dan *ago* yang artinya pemimpin. Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal. Strategi berkaitan dengan hubungan akhir sedangkan taktik berhubungan dengan tujuan menengah.⁸

Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menggapai lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran.⁹

Menurut Richard Beckhart pengembangan organisasi sebagai suatu usaha untuk berencana, mencakup organisasi keseluruhan, dan dikelola dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui

⁸ Sjafrizal, *Ekonomi Regional*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), hlm. 209.

⁹ Djoko muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 15.

intervensi berencana terhadap proses yang terjadi dalam organisasi dengan mempergunakan pengetahuan yang berasal dari ilmu perilaku.¹⁰

Dalam hal ini strategi apa yang digunakan khususnya oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Banyumas.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdapat definisi sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.

¹⁰ Adam Indrawijaya, *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, ,1989), hlm.38.

10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)¹¹

3. Strategi Pengembangan UMKM

Strategi pengembang UMKM adalah upaya pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dalam mengembangkan UMKM agar mencapai tujuannya yaitu menjadikan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah sebagai pelaku ekonomi utama dan perekonomian nasional yang maju dan berdaya saing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah atau pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana strategi pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas dan memberikan alternatif strategi yang tepat bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti, Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan terkait dengan masalah penelitian serupa.

¹¹ Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 112- 114

- b. Bagi Mahasiswa, Sebagai referensi pengetahuan mahasiswa tentang UMKM. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa mengerti tentang bagaimana strategi pengembangan UMKM pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.
- c. Bagi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, Sebagai sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan dalam mengevaluasi program yang dikeluarkan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas yang diberikan kepada masyarakat selama ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

1. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019 strategi pengembangan yang bisa dilakukan di Indonesia adalah:¹²
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - b. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
 - c. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
 - d. Penguatan kelembagaan usaha
 - e. Kemudahan, kepastian dan perlindungan
2. Menurut Suhendar Sulaeman, Strategi dalam upaya mengembangkan UKM dimasa depan yaitu dengan memperhatikan kekuatan dan tantangan yang ada serta mengacu pada beberapa hal:¹³

¹² Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tahun 2015-2019, hlm. 38

¹³ Sulaeman Suhendar, "Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global". *Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004*

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan UKM secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan.
- b. mempermudah perijinan, pajak dan retribusi lainnya.
- c. mempermudah akses pada bahan baku, teknologi dan informasi.
- d. menyediakan bantuan teknis (penatihan, penelitian) dan pendampingan serta manajemen (SDM, keuangan dan pemasaran) melalui lembaga pendamping.
- e. secara rutin lembaga tersebut melakukan pertemuan, lokaknya model pelayanan bisnis yang baik dan tepat.
- f. mendorong lembaga untuk memiliki keahlian khusus.
- g. menciptakan sistem penjamin kredit yang terutama disponsori oleh pemerintah pusat dan daerah.
- h. secara bertahap dan berkelanjutan mentransformasi sentra bisnis (parsial) menjadi kluster bisnis (sistemik).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwasannya tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu (1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; (2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; (3) meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Peneliti telah menemukan literatur yang terkait dengan hal itu, yang diantaranya yaitu:

1. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal yang ditulis oleh Edy Suandi Hamid dan Y Sri Susilo. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No.1. 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya untuk mengembangkan UMKM tentu saja tidak hanya dibebankan pada UMKM sendiri namun harus memperoleh dukungan seluruh *stake-holders*. Dukungan bermaksud diharapkan dating

dari asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan atau dinas/ instansi terkait dilindungi pemerintah kabupaten/ kota dan Provinsi. Di samping itu diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM di Yogyakarta pada dasarnya adalah percepatan transformasi UMKM dari fase formal menuju fase stabilisasi. Dalam rangka pengembangan tersebut maka direkomendasikan berbagai kebijakan dan strategi meliputi: (1) Berbagai pelatihan dalam pengembangan produk yang lebih variatif dan berorientasi kualitas dengan berbasis sumber daya local; (2) Dukungan pemerintah dalam proses produksi dengan revitalisasi mesin dan peralatan yang lebih modern; (3) Pengembangan produk yang berdaya saing tinggi dengan muatan ciri khas lokal; (4) Kebijakan kredit oleh perbankan dengan bunga lebih murah dan proses lebih sederhana sehingga akan mendukung percepatan proses revitalisasi proses produksi; (5) Peningkatan kualitas infrastruktur fisik maupun nonfisik untuk menurunkan biaya distribusi sehingga produk UMKM akan memiliki daya saing lebih tinggi.¹⁴

2. *Kajian Faktor- Faktor yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi Kasus di Kota Surakarta*. Jurnal yang ditulis oleh Sakur. Spirit Publik Volume 7, Nomor 2 Oktober 2011. Hasil penelitian menunjukkan Bahwasannya terkait usaha untuk memaksimalkan struktur modal UMKM untuk meningkatkan kinerjanya melalui 2 proses yaitu: (1) Meningkatkan berbagai potensi untuk memaksimalkan struktur modal melalui berbagai macam fasilitas pembiayaan dan dukungan terhadap UMKM secara kontinyu dan berorientasi jangka panjang seperti pendampingan, perencanaan bantuan agar tepat guna dan tepat sasaran serta pemberian akses informasi yang luas terhadap UMKM. (2) Perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya terkait kebijakan pemerintah agar menciptakan lingkungan bisnis yang stabil sehingga UMKM dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan membuat keputusan terkait strategi bisnis yang sesuai untuk meningkatkan UMKM baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lingkungan bisnis yang

¹⁴ Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" *journals.ums.ac.id*, diakses 17/11/2017 pukul 14.00

bervariasi dan kemampuan untuk merespon berbagai macam keanekaragaman lingkungan bisnis sangat diperlukan dalam merumuskan strategi bisnis yang tepat dalam mengambil kebijakan yang terintegrasi.¹⁵

3. *Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Wuryandari dan Hilma Meilani. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya untuk mengembangkan UMKM melalui program iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah, program meningkatkan kualitas kelembagaan. Adapun beberapa kebijakan usaha dari sudut pandang usaha kecil dan menengah domestic, seperti dalam hal mendirikan usaha (*starting a business*), mengurus izin untuk mendirikan bangunan (*dealing with construction permits*), dan mendaftarkan property (*registering property*). Dukungan sepenuhnya tidak berarti pemerintah melakukan intervensi langsung di semua aspek bisnis UMKM, melainkan dalam bentuk penciptaan suatu lingkungan berusaha yang kondusif sehingga UMKM mampu melakukan pemberdayaan secara optimal.¹⁶
4. *Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Tarakan*. Jurnal yang tulis oleh Ariani dan Mohamad Nur Utomo. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 13 No 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya strategi pengembangan yang dilakukan di kota Tarakan yaitu bagi UMKM agar menjaga stabilisasi dari usaha baik dari penggunaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja hingga birokrasi pemerintahan. Mempelajari dan membuat ijin paten guna mendapatkan perlindungan usaha baik dari monopoli maupun dari ekspansi eksternal dari

¹⁵ Sakur, "Kajian Faktor- factor yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi Kasus di Kota Surakarta" *eprints.uns.ac.id*, diakses 11/11/2017 pukul 21.00

¹⁶ Dewi Wuryandari dan Hilma Meilani, "Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" *urnal.dpr.go.id* diakses 01/12/2017 pukul 08.00

pemerintah memperbaiki manajemen internal minimalkan hambatan secara eksternal seperti kesediaan tenaga listrik yang dianggap mengganggu kegiatan operasional dari UMKM dengan menyediakan sarana dan prasarana yaitu perlengkapan peralatan produksi. Bagi pemerintah dan lembaga terkait agar memberikan keleluasaan dalam pengembangan usaha UMKM di kota Tarakan baik dalam hal penyediaan pelatihan, sarana dan prasarana serta penyediaan informasi bagi pengembangan UMKM di kota Tarakan¹⁷

5. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan*. Jurnal yang tulis oleh Alyas dan Muhammad Rakib. Jurnal Sosiohumaniora Volumen 19 No. 17 Juli 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan usaha diantaranya yaitu lokasi yang strategis, memaksimalkan bantuan modal dari Pemerintah, meningkatkan kapasitas penjualan, memaksimalkan jumlah pelanggan tetap, melakukan inovasi dan variasi produk, pemanfaatan teknologi dalam melakukan promosi yang intensif, penerapan sistem manajemen usaha terutama dalam segi pencatatan keuangan dan administrasi, dan peningkatan kualitas SDM guna memaksimalkan kapasitas produksi.¹⁸

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hasil penelitian terdahulu yang ada, akan dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yang dapat disajikan dalam bentuk tabel 1.3, sebagai berikut:

(Tabel 1.3) Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

Nama	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
Edy Suandi Hamid dan Y Sri Susilo	<i>Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di</i>	bahwa dalam rangka pengembangan UMKM maka dilakukan kebijakan dan strategi meliputi:	Persamaan: Membahas tentang peran pemerintah dalam pengembangan UMKM Perbedaan: Lokasi dan

¹⁷ Ariani dan Mohammad Nur Utomo, "Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan" *jurnal.ut.ac.id diakses pada 12/12/2017 pukul 21.00*

¹⁸ Alyas dan Muhammad Rakib, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan" *jurnal.unpad.ac.id diakses 12/12/2017 pukul 21.30*

Nama	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	<p><i>Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</i></p> <p>Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12, No.1. 2011</p>	<p>pelatihan, dukungan pemerintah, kebijakan kredit oleh perbankan dengan bunga lebih murah, peningkatan kualitas infrastruktur.</p>	<p>waktu penelitian serta peran dan strategi yang dilakukan pemerintah</p>
Sakur	<p><i>Kajian Faktor-Faktor yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi Kasus di Kota Surakarta, Spirit Publik</i></p> <p>Volume 7, Nomor 2 Oktober 2011</p>	<p>bahwa usaha untuk memaksimalkan struktur modal UMKM untuk meningkatkan kinerjanya melalui 2 proses yaitu, meningkatkan berbagai potensi untuk memaksimalkan struktur modal dan perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya terkait kebijakan pemerintah agar menciptakan lingkungan bisnis yang stabil</p>	<p>Persamaan: Membahas tentang faktor pendukung pengembangan UMKM</p> <p>Perbedaan: Lokasi dan waktu penelitian</p>
Dewi Wulyandari dan Hilma Meilani	<p><i>Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam</i></p>	<p>Bahwa untuk mengembangkan UMKM melalui program iklim usaha</p>	<p>Persamaan: Membahas tentang peran pemerintah serta kebijakan</p>

Nama	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	<p><i>Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,</i> Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 4 No.1</p>	<p>kecil menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah, program meningkatkan kualitas kelembagaan.</p>	<p>pengembangan UMKM Perbedaan: Lokasi dan waktu penelitian serta strategi yang diterapkan pemerintah</p>
<p>Ariani dan Mohamad Nur Utomo</p>	<p><i>Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Tarakan,</i> Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 13 No 2</p>	<p>untuk menstabilisasi dari usaha baik dari penggunaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, hingga birokrasi pemerintah, mempelajari dan membuat hak paten guna mendapatkan perlindungan usaha baik dari monopoli</p>	<p>Persamaan: Membahas tentang strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM Perbedaan: Lokasi dan penelitian serta strategi yang di terapkan pemerintah</p>
<p>Alyas dan Muhammad Rakib</p>	<p><i>Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</i></p>	<p>untuk mengembangkan UMKM tersebut maka diantaranya lokasi yang strategis, memaksimalkan</p>	<p>Persamaan: Membahas tentang strategi pengembangan UMKM Perbedaan: Lokasi dan penelitian serta strategi</p>

Nama	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	<i>dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan</i>	bantuan pemerintah, meningkatkan kapasitas penjualan, memaksimalkan jumlah pelanggan tetap, melakukan inovasi dan variasi produk, pemanfaatan teknologi dalam melakukan promosi,	yang diterapkan pemerintah

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian ini merupakan kerangka skripsi yang maksudnya memberi petunjuk mengenai pokok- pokok permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. Sistematika penelitian terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, serta daftar lampiran- lampiran

BAB I: Pendahuluan mengurai latar belakang masalah, perumusan maslaah, definisi operasional, tujuan dan mafaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini, kerangka pemikiran yang menerangkan secara ringkas tentang pengetian strategi, pengembangan, dan pengertian usaha kecil dan menengah (UMKM).

BAB III: Metodologi Penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Analisis Penelitian menguraikan tentang Strategi Pengembangan UMKM pada Dinnakerkop UMKM Kabupaten Banyumas yang meliputi sejarah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM , visi dan misi, struktur organisasi, serta data UMKM di Kabupaten Bnayumas. Kemudian akan dibahas pula mengenai bagaimana strategi yang digunakan untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Banyumas.

BAB V: Penutup mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran- saran. Selanjutnya pada bagian akhir skripsi akan disertakan daftar pustaka, lampiran- lampiran data yang mendukung dan daftar riwayat hidup peneliti.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti, melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Maka dapat diperoleh analisis faktor eksternal dan faktor internal yang berupa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas. Analisis faktor eksternal dan internal dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini memunculkan 4 jenis strategi yang tepat dan dapat di jadikan sebagai alternatif strategi pengembangan bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka alternatif strategi yang dapat dikembangkan, yaitu:

1. Strategi SO

- a. Mengembangkan produk UMKM dengan adanya kerjasama antara lembaga keuangan perbankan dengan memanfaatkan terbukanya pasar bagi produk-produk UMKM di Banyumas. (S5-O2)
- b. Mengembangkan keahlian SDM yang sudah memadai dengan memanfaatkan terbukanya produk-produk barang kerajinan UMKM untuk di ekspor. (S6-O4)
- c. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan perekonomian regional dengan memanfaatkan jaringan kerjasama antar daerah bagi pemasaran barang (S7-O5)

2. Strategi ST

- a. Mengembangkan iklim yang kondusif terutama dalam hal perizinan dan kebijakan investasi guna meminimalisir masuknya pemodal besar dalam hal mendirikan minimarket (S3-T3)

- b. Mengembangkan masyarakat Banyumas sebagai pasar potensial guna meminimalisir arus globalisasi/ persaingan pasar dengan barang-barang import (S8-T2)

3. Strategi WO

- a. Mengembangkan lapangan pekerjaan untuk meminimalisir pengangguran melalui kerjasama dengan pemerintahan yang kondusif (W1-O6)
- b. Mengembangkan produk-produk yang berkualitas dengan memanfaatkan kerjasama antar daerah balingmasakeb dan kerjasama antar pemerintahan provinsi dan pusat. (W4-O1)

4. Strategi WT

- a. Mengembangkan kecenderungan masyarakat menengah ke atas yang cinta terhadap produk dalam negeri guna meminimalisir produk luar negeri ke Banyumas (W2-T5)
- b. Mengembangkan produk yang beredar dengan ketentuan memenuhi undang-undang guna meminimalisir banyaknya produk yang sejenis atau sama dengan kabupaten lain. (W3-O1).

B. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti menyumbangkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut. Adapun saran-saran yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan rendahnya jiwa kewirausahaan yang berdampak pada kurang beraninya UMKM untuk mengembangkan inovasi-inovasi produknya, bisa diatasi dengan di tambahannya intensitas pelaksanaan pelatihan yang khusus mengajarkan tentang materi kewirausahaan secara intensif dan rutin. Sehingga kegiatan yang dilakukan akan dapat membantu untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Banyumas. Selain itu, materi yang disampaikan dalam setiap pelatihan hendaknya lebih bervariasi, agar pengetahuan yang diperoleh pun dapat beragam. Sehingga bukan hanya kuantitas operasionalnya yang diutamakan, tetapi juga kualitasnya yang perlu di perhatikan.

2. Untuk mengetahui masalah pemasaran, Pemerintah Kabupaten Banyumas sebaiknya mengadakan kegiatan event-event promosi yang lebih unik dan berbeda, seperti mengadakan pameran tiap akhir pekan yang dilengkapi dengan hiburan-hiburan dan pemberian potongan harga agar masyarakat lebih tertarik untuk membeli produk UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas.



DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prasetyo. 2015. *Manajemen Strategi; Keunggulan Bersaing Kelanjutan*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Alyas dan Muhammad Rakib, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan" *jurnal.unpad.ac.id*
- Ariani dan Mohammad Nur Utomo, "Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan" *jurnal.ut.ac.id*
- Arsyad Lincoln. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Aziz Fathul Aminudin. 2012. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan.
- Bungin Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.
- David Fred R. 2006. *Manajemen Strategis Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwiyanto Agus dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Fajar Mukti. 2016. *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzia Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamid Edy Suandi dan Y. Sri Susilo, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" *journals.ums.ac.id*.
- Hani T Handoko. 2013. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Hasan Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indrawijaya Adam I. 1989. *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Ismail Muhammad, Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- J Bobo. 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Cidesindo.

- Koentjaraningrat. 1994. *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komaruddin. 1990. *Manajemen Berdasarkan Sasaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Meleong Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljono Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi
- Rahmana Arief, *Usaha Kecil dan Menengah*, www.google.com.
- Reksohadiprodo Sukanto. 2003. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,
- Rivai Veithzal. 2009. *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan Rosady. 2006. *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- S Prawirokusumo. 1999. *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan dan Strategi)*. Yogyakarta: BPFE.
- Sakur, “Kajian Faktor- factor yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi Kasus di Kota Surakarta” *eprints.uns.ac.id*.
- Sjafrijal. 2008. *Ekonomi Regional*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Sochimim. 2017. *Kewirausahaan: Teori Aplikatif dan Praktik*. Yogyakarta: Cinta Buku.
- Solihin Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga
- Subandi. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sudantoko Djoko. 2005. *Dinamika Otonomi Daerah*. Semarang: Adi Kencana, 2005.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendar Sulaeman. “Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global”. *Infokop Nomor 25 Tahun XX*. 2004
- Tambunan Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu- Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.

- Umar Hamalik. 2007. *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu: Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Wilantara Rio F, Susilawati. 2016. *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung: PT. Reflika Aditama
- Winardi J. 2015. *Manajemen Perubahan: (The Management Of Change) Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Wuryandari Dewi dan Hilma Meilani, "Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" *jurnal.dpr.go.id*.



IAIN PURWOKERTO